

# ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL

# A. ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL

## Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi <sup>diri,</sup> keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak <sup>dan</sup> kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan selaras dengan kepentingan keluarga dan 108

108 PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA:

masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (social security), seperti bantuan sosial (social assistance) dan jaminan sosial (social insurance), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Akan tetapi, dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna "kondisi" menurut UU No 6 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai "sistem organisasi" yang terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Panti-panti sosial, dan lain-lain.

Serta ada juga yang mengartikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah "gerakan/aktivitas", pemaknaan tersebut tidak bisa dilepaskan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas manusia

PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA: 109

dapat meningkatkan taraf hidup (well-being) agar dapat bersaing dan berkelangsungan hidup di masyarakat.

Dari ketiga arti tersebut, makna kesejahteraan sosial tidak hilang begitu saja tetapi ada salah satu arti atau makna lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dan pembangunan bangsa saat ini. Arti yang keempat itu adalah "ilmu/ science". Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Sebagai ilmu, ilmu kesejahtaeraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin ilmu yang lainnya separti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi, dan lain-lain.

Dalam hal ini peranan ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan dari ilmuilmu sosial dan ilmu murni lainnya. Apabila diasumskani maka ilmu murni seperti, Sosiologi, Psikologi, Antropologi merupakan bapak dan ibu sedangkan ilmu kesejahteraan sosial merupakan anak dari pencampuran dua atau lebih ilmu murni yang dapat diterapkan kajiannya di lapangan sebagai bentuk pertolongan dan penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

Akan tetapi, tidak semua ilmu- ilmu murni dapat diadobsi dalam ilmu kesejahteraan sosial sebagai konsepteori,dan metode karena kajian yang akan dipakaipun sebagai obyek sasaran dari ilmu kesejahteraan sosial harus dapat diimplementasikan menurut kondisi obyek sasaran serta

pendekatan yang digunakan harus holistik sehingga diketahui permasalahan yang akan dikaji dan memiliki tujuan yang cukup jelas.

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial. Seperti halnya Sosiologi, psikologi, Antropologi, Ekonomi, Politik, Studi Kependudukan, dan Pekerjaan Sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya, dan strategi penanggulangannya.

#### 2. Latar Belakang Sejarah

Sejarah keberadaan Ilmu Kesejahteraan Sosial, pada awalnya tidak dapat dilepaskan dari Filsafat dimana Filsafat merupakan asal mula ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu tersebut selanjutnya dijabarkan lagi sehingga bisa berdiri sendiri diri, seperti halnya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Misalnya saja salah satu cabang filsafat yang menjadi pegangan bagi praktisi pekerja sosial professional dalam ilmu kesejahteraan sosial yaitu tentang etika yakni aksiologi yang disebut dengan filsafat nilai, dimana standar nilai etis yang disepakati secara universal seperti keadilan, kejujuran, dan keiklasan kesemuanya ini menyentuh persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia baik mengenai jasmani maupun rohaninya.

Menurut Bertens, dalam Setiadi dkk, menyebutkan ada tiga jenis makna etika:

- Pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi
- pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkahlakunya.
- Kedua, etika berarti juga kumpulan asa atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik.
- 4) Ketiga, etika mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk atau etika di sini sama dengan filsafat moral.10 Dari ketiga pengertian etika yang telah disebutkan kesemuanya dipergunakan dalam melakuakan intervensi praktek pekerjaan sosial.

Oleh sebab itulah Filsafat tidak bisa dipisahkan dengan ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial dan disiplin Pekerjaan Sosial saling berhubungan erat, karena kedua disiplin ini mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya, di mana Pekerjaan Sosial merupakan salah satu disiplin yang berperan dalam pembentukan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Akar sejarah dari bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, sering kali dikaitkan dengan kondisi Eropa pada abad ke 18. Karena pada abad tersebut pemerintahan Inggris telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Undang-undang kemiskinan yang paling terkenal pada masa itu adalah Elizabethan Poor Law,

yang dikeluarkan pada tahun 1601, yang di dalamnya mencakup tiga kelompok penerimaan bantuan:

- Orang-orang miskin yang kondisi fisiknya masih kuat (the able bodied poor). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pengemis yang masih bertubuh kuat. Mereka diberi pekerjaan kasar (low-grade employment), dan para penduduk dilarang memberikan bantuan finansial kepada mereka, sehingga mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Orang-orang miskin yang kondisi fisiknya buruk (the impotent poor), seperti halnya: para lanjut usia, tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tuna wisma (tidak mempunyai tempat tinggal) mereka akan di tempatkan dalam satu panti yang disebut dengan almhouse, para ibu dengan anak yang masih kecil, dan para penderita cacat fisik maupun mental.
- 3) Anak-anak yang hidupnya masih tergantung pada orang yang lebih mapan (Dependent Childrent), yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, anak yatim piatu, bayi yang diterlantarkan (foundslings), atau anak-anak yang orang tuanya sudah sangat miskin sehingga tidak mampu membiayai anak-anaknya. Anak-anak ini ditawarkan pada warga setempat untuk dipekerjakan. Bagi anak lakilaki mereka bekerja pada tuannya sampai usia 24 tahun, sedangkan anak perempuan, biasanya mereka diangkat

menjadi pembantu rumah tangga (domestic servants) <sub>dan</sub> dipekerjakan hingga mereka berusia 21 tahun.11

Undang-undang Kemiskinan yang dikeluaarkan oleh Ratu Elizabeth pada tahun 1601 dianggap sebagai cikal bakal intervensi pemerintah terhadap warga negara, dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Karena pada masa sebelumnya, usaha-usaha kesejahteraan sosial (social services atau social welfare services) lebih banyak dilakukan oleh kelompok keagamaan, seperti dari pihak gereja.

Menurut Candadan Furma, dalam Rukminto, mengemukakan selain pihak Gereja, pada abad ke enam masehi agama Islam telah melakukan reformasi pada masanya dalam hal keadilan sosial, baik untuk kaum perempuan, anak-anak dan kelompok yang kurang diuntungkan, hal ini tergambar dari pandangan mereka bahwa:

"Since the person and the community should be wholly oriented toward the will of Allah, there is no separation between regious and secular spheres of life. As Muhammad (peace be upon him) originally advocated for social reforms on behalf of women, children, and disadvanted group, there is strong social justice value framework in Islam. Ideally, there should be a reciprocal elatianship between individual freedom and community obligations and responsibilities. The Qur'an condemns exploitation of the poof, widows, other women, orphans, and slaves. It denounces economices abuse, such as false contracts, bribery, boarding of whealth usury"

individu komunitas dan (Karena harus berorientasi satu, yaitu meraih ridha Allah, maka tidak ada pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia Islam. Seperti Muhammad saw ajarkan (pada umat Muslim) untuk melakukan advokasi reformasi sosial berdasarkan kepentingan perempuan. anak-anak, dan kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan. Pada agama Islam terdapat penekanan yang sangat kuat pada kerangka nilai keadilan sosial. Secara ideal, seharusnya tercipta hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara kebebasan individu dengan kewajiban dan tanggung jawab dari komunitas. Al-Our'an mengutuk ekploitasi pada orang miskin, janda-janda, kaum perempuan, yatim piatu dan budak. Al-Qur'an juga mencela penyalahgunaan 'kekuatan' ekonomi, seperti melakukan kontrak palsu, penyuapan, menumpuk harta, dan riba).

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa kegiatan sosial dari kelompok keagamaan sudah berakar jauh sebelum abad ke 16. Namun dari semua kegiatan yang dilakukan terdapat satu persamaan, yaitu adanya nilai kemanusiaan (humanitarianisme) yang dijunjung tinggi oleh masing-masing agama. Nilai-nilai humanitarianisme inilah yang menjadi titik awal untuk melihat bahwa apa yang terjadi pada sekelompok orang miskin tersebut tidaklah benar, sehingga dalam ajaran agama khususnya Islam menganjurkan untuk memperbaiki hal tersebut. Karena salah satu akar dari nilai humanitarianisme sendiri dapat dilihat nilai-nilai agama.

Sehingga tindakan dari aktivis agamalah yang kem<sub>udian</sub> mengilhami berkembangnya para relawan kemanusiaan. Hal ini dapat terlihat dari salah seorang pendiri (prominent founder) bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, yaitu Janes Addams (dilahirkan tahun 1860), ia aktif di Gereja Presbyterian, dan aktif menolong masyarakat miskin di Inggris dan juga Amerika, sehingga pada tahun 1931 ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian.

Hal yang sama juga dialami oleh Bunda Theresa yang mendapat hadiah Nobel perdamaian karena usahanya mengentaskan kemiskinan di India pada abad ke 19. Nilai-nilai humanitarianisme terdapat juga dalam agama Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam upaya pengentasan kemiskinan membantu masyarakat yang tertindas dan membutuhkan pertolongan.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragam Islam, maka anggota masjid sangat berperan penting dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial dilakukan secara gratis, selanjutnya setelah kesejahteraan sosial menjadi kajian dan usaha yang bersifat ilmiah/professional, khususnya pekerjaan sosial, menjadi persoalan terminologis tersendiri, ketika "ilmu" ini dikembangkan di Indonesia.

### B. DINAMIKA PERKEMBANGAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

### 1. Pekerja Sosial dan Layanan Sosial

Kesejahteraan sosial, merupakan salah satu ilmu yang pada dekade terakhir ini berkembang, yaitu ilmu pengetahuan yang mendudukkan berbagai teori sosial untuk memberikan layanan sosial secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan kehidupan. Ilmu ini diajarkan dan dikembangkan sebagai bekal bagi masyarakat peserta pelajar supaya dapat melakukan pendampingan, layanan dan bantuan sosial secara maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat hidup secara mandiri, layak, berkelanjutan dengan berbekal kemampuan yang dimiliki yang belum didayagunakan.

Pekerjaan Sosial Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistemsistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Sedangkan pengertian lain dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas professional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki

PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA: 117

kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif

Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh body of knowledge (kerangka pengetahuan), body of skills (kerangka keahlian), dan body of values (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antopologi, filsafat, ekonomi, dan politik.

Dari pengertian di atas, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (people) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (human wellbeing) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting.

Berdasarkan kajian Islam yang berhubungan dengan pekerjaan sosial, dikarenakan Islam merupakan salah satu agama yang paling bertanggung jawab untuk mencari solusi terhadap problem sosial yang ada di masyartakat, maka dari itu terdapat beberapa aspek dasar yang saling terkait yakni: pertama dasat teoligis, ini terlihat dari spirit kesatuan manusia dalam Islam tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap manusia atas dasat apapun baik agama, ras, ekonomi, fisik, warna kulit, gender, suku dan lain-lain.

Dan manusia juga dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani di mana keduanya harus diperhatikan dan dikuatkan secara bersama-sama. Kedua dasar akademik, social work (pekerjaan sosial) dapat ditelusuri melalui kajian dakwah, karena dakwah memiliki tujuan mulia untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan menurut nilai dan norma ajaran Islam yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan serta kesejahteraan. Dakwah dalam perspektif social work dapat dijabarkan lagi menjadi:

- Pengembangan (Development), yakni dakwah dilakukan dalam rangka membantu seseorang agar dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan potensi yang dimiliki untuk mencapai kondisi hidup yang lebih sejahtera,
- 2) Layanan sosial (social service) hal ini dilakukan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial guna meningkatkan kesejahteraan terhadap mereka, dan yang ke 3) Pembelaan (advokasi), dakwah dalam hal ini dilakukan terhadap seseorang yang mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya.

Sosial atau operasional, adanya dasar sosial Islam tentang; zakat, infaq, sadaqah, pembebasan mustadh'afin, orang-orang tertindas karena korban kultur, perintah memerdekan budak dan lain-lain.16 Ilmu social work dalam hal ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola ajaran Islam tentang sosial, sehingga menjadi ajaran yang fungsional serta dampak sosialnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang kurang beruntung.

# 2. Konsep Dasar Profesi Pekerjaan Sosial

Dari pengertian di atas ada beberapa konsep yang mendasari Praktik Pekerjaan Sosial yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas. tugasnya. Beberapa konsep tersebut adalah:

Pekerjaan Sosial adalah kegiatan Profesional. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebuah profesi jika dia memiliki minimal dua unsur pokok. Dalam Bukunya Dwy Heru Sukoco menjelaskan unsur pokok Profesi Pekerjaan Sosial adalah:

Kegiatan tersebut harus berlandaskan kepada ilmu a) pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan (value). Artinya kegiatan yang dilakukan dilaksanakan Pekerja Sosial yang telah mendapatkan pendidikan baik teori serta praktek di Sekolah Khusus/Perguruan Tinqqi yang memberikan pendidikan Pekerjaan Sosial. Melalui pendidikan khusus juga Pekerja Sosial diajarkan berbagai teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Klien sebagai keahlian Pekerja Sosial. Demikian pula nilainilai juga dipelajari dalam pendidikan Pekerjaan Sosialagar Pekerja Sosial dalam menangani masalah Klien memiliki batasan-batasan sehingga tidak terjadi penyimpangan praktek. Dengan adanya ketiga kerangka dasar ini <sup>maka</sup> Praktek Pekerjaan Sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b) Kegiatan tersebut harus diarahkan kepada kepentingan umum (public interest). Artinya, suatu kegiatan harus diarahkan untuk semua tanpa memihak kepada golongan tertentu. Pelayanan yang diberikan harus dapat menjangkau seluru lapisan masyarakat atau bermanfaat bagi kepentingan umum. Tidak boleh membeda-bedakan masyarakat tingkat atas, menengah atau bawah. Apabila suatu profesi diperuntukkan hanya bagi golongan tertentu, atau melakukan diskriminasi maka telah melanggar hakekat kelahiran dan tanggung jawab sosialnya.

Praktek Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan Pertolongan. Seperti halnya Profesi lain, Profesi Pekerjaan Sosial juga merupakan Profesi Pertolongan (Helping action). Akan tetapi, Konsep Pertolongan Profesi Pekerjaan Sosial berbeda dengan Konsep Profesi lain, Konsep Pertolongan Pekerjaan Sosial adalah "to help people to help themselves" (menolong orang agar orang mampu menolong dirinya sendiri).

Berlandaskan kepada konsep di atas, maka pertolongan Pekerjaan Sosial mempunyai dua ciri pokok, yaitu:

- Orientasi pertolongan Profesi Pekerjaan Sosial dipusatkan terhadap kepentingan Klien/Orang yang ditolong.
- Pekerja Sosial selalu bekerja sama dengan Klien (Working with Client). Klien yang dibantu adalah orang baik individu atau kolektifitas (keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat). Pekerja Sosial harus memiliki teknik-

- teknik serta metode-metode untuk membantu klien yang mengalami masalah dalam interaksi sosial dengan lingkungannya, sehingga memperlemah fungsi Sosialnya dan menimbulkan masalah.
- Intervensi Pekerjaan Sosial dipusatkan kepada peningkatan fungsi sosialnya. Intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial harus mengarah kepada kemauan, harapan harapan, kebutuhan Klien baik fisik dan sosial, serta potensi-potensi yang ada dalam diri Klien. Untuk mengetahui unsur-unsur diatas Pekerja Sosial harus melakukan asesmen terhadap Klien.
- Dasar pengetahuan ilmiah Pekerjaan Sosial dapat di kelompokan kepada tiga jenis, yaitu: tested, hypothetical dan assumptive knowledge.
- Pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk praktek Pekerjaan Sosial ditentukan oleh tujuan, fungsi dan permasalahan yang dihadapi.
- 6) Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan vital bagi para Pekerja Sosial Profesional. Keterampilan profesi Pekerjaan Sosial diekspresikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional. (Skidmore dan Thackeray, 1982:
- 7) Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial adalah sistem program suatu negara, manfaat, dan layanan yang membantu orang, ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan yang mendasar untuk pemeliharaan masyarakat. Reid (1995) menggambarkan Kesejahteraan Sosial sebagai "ide, bahwa ide menjadi salah satu dari masyarakat yang

layak yang menyediakan kesempatan untuk bekerja, memberikan keamanan yang wajar dari keinginan dan penyerangan, mengutamakan kejujuran dan evaluasi berdasarkan pada jasa individu, dan ekonomi produktif dan stabilitas". (hal. 206).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.

Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dari kedua definsi diats, Kesejahteraan Sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat fisik maupun nonfisik, yang pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta dapat emnjalankan perannya di amsyarakat. Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial EksistensiProfesi Pekerjaan Sosial telah memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia, antara lain:

- Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan Pekerja Sosial sebagai "the primary profession" dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.
- Kedua, Pekerja Sosial telah memasuki era baru yaitu 2) Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap Pekerja Sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi Pekerja Sosial.
- Secara legal definisi Pekerjaan Sosial dan praktik Pekerjaan Sosial, persyaratan menjadi Pekerja Sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi,

keberadaan asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan Pekerja Sosial bersertifikat dan berlisensi.

Keempat, kebijakan saat ini yang menjadi arus utama 4) Kementerian Sosial adalah "one stop services" dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita. Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang Pekerjaan Sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan Pekerja Sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Sosial Korban Penyalahgunaan Lembaga Rehabilitasi Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau Roadmap Pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia. (dikutip dari http://www.kemsos.go.id/ modules.php?name=News&file=print&sid=17908 tanggal 14/12/ 2014 pukul 00:06).

Operasionalisasi Pekerjaan Sosial Pendidikan Pekerjaan Sosial mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan dan mencetak intelektual sebagai kader bangsa yang peduli terhadap penanganan masalah sosial. Utamanya di wilayah Timur Indonesia yang hingga kini masih banyak membutuhkan Pekerja Sosial untuk melakukan pemberdayaan dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, merupakan suatu tugas yang mulia bagi tenaga Kesejahteraan Sosial untuk

"Membangun sinergisitas dan profesionalitas Pekerja Sosial yang handal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur Indonesia."

Sangat disadari bahwa Pekerjaan Sosial haruslah menjadi dekat dengan konteks di mana ia diaplikasikan. Oleh karena itu, memaknai dan mempraktekan Pekerjaan Sosial yang berbasis multikultur sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia adalah tugas yang perlu dilakukan agar Pekerjaan Sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan ribuan pulau besar dan kecil, dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dan suku bangsa.

Paling sedikit terdapat 300 etnik atau suku-bangsa di konteks Indonesia Sosial yang mendedikasikan diri dalam konteks Indonesia perlu memahami budaya multikultur.

126 PEKERIAAN SOSIAL DI INDONESIA:

Kemampuan responsif atas keragaman budaya inilah yang disebut kompetensi budaya dari Pekerja Sosial (Multicultural Social Work).

- a) Untuk mengintegrasikan kompetensi budaya pada Pekerjaan Sosial, maka ada lima prinsip dasar yang perlu dipahami: Menghargai perbedaan dan keragaman budaya;
- b) Menerapkan instrumen penilaian budaya dalam praktek Pekerjaan Sosial;
- Melatih kesadaran Pekerja Sosial tentang dinamika yang terjadi pada saat interaksi lintas-budaya;
- d) Memasukan pengetahuan budaya ke dalam kurikulum pendidikan dan melatih sikap lentur terhadap keragaman budaya;
- e) Melatih kerjasama lintas-budaya, adaptasi budaya, dan pemahaman karagaman budaya.

Situasi sebagaimana gambaran tadi memotivasi kita untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial dalam konteks Indonesia, yang selaras dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya Indonesia. Dalam upaya mendukung pengembangan Pekerjaan Sosial sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, perlu mencermati dilakukan hal-hal sebagai berikut:

 Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan Pekerjaan Sosial berbasis kompetensi generalis dan spesialis Praktek Pekerjaan Sosial adalah suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan

PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA: 127

baik secara perseorangan, keluarga untuk membantu. maupun kelompok masyarakat untuk mencapai kemandirian secara pribadi dan sosial. Berkembangnya masalah sosial yang semakin kompleks, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan Pekerja Sosial yang tidak hanya mampu melaksanakan praktek Pekerjaan Sosial secara generalis, namun mengarah pada spesialisasi kompetensi Pekerjaan Sosial, seperti Pekerjaan Sosial dengan anak, keluarga dan sekolah; Pekerjaan Sosial dalam situasi bencana; Pekerjaan Sosial medis dan kesehatan publik; Pekerjaan Sosial dengan disabilitas; Pekerjaan Sosial forensik/ koreksional;dan lain-lain. Kebutuhan Pekerja Sosial yang spesialis dapat dipenuhi apabila sistem pendidikan dan pelatihan profesi Pekerja Sosial juga mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pekerjaan Sosial spesialis.

2. Mengembangkan praktek Pekerjaan Sosial berbasis perseorangan, keluarga dan komunitas yang terintegrasi Kebijakan dan program Kesejahteraan Sosial pada masa lalu cenderung dilaksanakan secara sektoral/fragmentaris, masalahyangaktual,fokuspadapelayanan berbasis institusi/ yang dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pada Kesejahteraan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau seluruh warga negara yang

mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program Kesejahteraan Sosial yang melembaga dan profesional, serta mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Para Pekerja Sosial dituntut memiliki kompetensi Pekerjaan Sosial yang mengintegrasikan pendekatan dan intervensi kepada perseorangan, keluarga dan komunitas sebagai satu kesatuan entitas praktek Pekerjaan Sosial. Keberadaan institusi panti sosial perlu direvitalisasi sebagai pusat layanan Kesejahteraan Sosial berbasis keluarga dan komunitas.

Mengembangkan organisasi profesi Pekerja Sosial yang 3. mandiri Keberadaan organisasi profesi Pekerja Sosial memiliki keunikan dan berbeda dengan negara-negara lain. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia lahir atas semangat para alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk berhimpun dan berserikat atas nama organisasi profesi, walaupun sistem pendidikan profesi dan sertifikasi Pekerja Sosial belum lahir. Kehadiran sistem setifikasi bagi Pekerja Sosial akan melahirkan para Pekerja Sosial sebagai profesi yang diakui dan bersertifikat. Adanya sertifikasi bagi Pekerja Sosial, akan menjadikan profesi Pekerja Sosial memperoleh lisensi/mandat bahkan dapat menyelenggarakan praktek secara mandiri. Oleh karena itu, organisasi profesi yang ada sekarang ini diharapkan dapat merevitalisasi diri sebagai organisasi profesi Pekerja Sosial yang mandiri.

sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. atau meluasnya masalah sosial yang dapat diaplikasikan melahirkan pendekatan khas guna mencegah terjadinya Sosial dapat menjadi perintis untuk Kesejahteraan begitu buruk. Untuk itu secara sistematis pendidikan ekonomi, dan politik,sebelum semuanya sudah menjadi eyebud ,laisos peucaua ancaman/risiko berbagai peringatan dini berbasis keluarga dan komunitas terhadap mandatnya memiliki tugas untuk membangun sistem sosial/bencana sosial. Pekerja Sosial dalam mengemban alam namun juga untuk pencegahan berbagai masalah warning system" bukan hanya untuk mencegah bencana pengembangan "sistem peringatan dini". Pentingnya "early lengah mengemban peran sebagai inisiator dalam menurut sebagian kalangan, Perguruan Tinggi tidak boleh dini munculnya masalah sosial. Hal ini penting karena mampu menjadi pilar utama dalam pencegahan secara diperlukan keterlibatan perguruan tinggi lainnya yang sosial ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, sangat masalah sosial telah berlangsung dan membawa dampak Dampak sosial yang ditimbulkan semakin berat jika lain untuk mencegah permasalahan sosial secara dini. kekuatan dengan masyarakat serta komponen bangsa Kementerian Sosial senantiasa bersinergi menggalang yang hanya beraksi ketika masalah sosial telah mar<sub>ak</sub> Kementerian Sosial bukan sebagai "pemadam kebakaran" masalah sosial Penekanan kebijakan untuk menjadikan Membangun sistem pencegahan secara dini munculnya

4

Menanamkan kepekaan dan kesalehan sosial Kepekaan dan kesalehan sosial tidak muncul begitu saja. Ia merupakan hasil dari sosialisasi nilai dan proses belajar. Kepekaan sosial sangat penting mengingat sampai saat ini struktur sosial budaya masyarakat Indonesia masih sangat beragam dalam pencapaian taraf Kesejahteraan Sosial. Kepekaan dan kesalehan sosial akan menjadi kekuatan yang sangat penting bagi penanganan masalah sosial. Selain Indonesia, nilai-nilai ini diyakini masih kuat melekat pada masyarakat Indonesia. Kesenjangan sosial yang tinggi antara kaum kaya dan miskin berisiko terjadi kecemburuan sosial dan munculnya sikap anti sosial/ anti kemapanan, bahkan dapat menimbulkan gejolak kerusuhan dan disintegrasi sosial. Dalam kondisi seperti ini, sifat individualistis yang hanya mementingkan diri sendiri sangat tidak cocok di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2011, diketahui indeks Gini Ratio sudah mencapai angka 0,41 yang menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi semakin tinggi. Pendidikan Kesejahteraan dan mendorong Sosial merangsang harus mampu masyarakat agar mampu meng-implementasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam bebagai bidang kehidupan. Harapan kita kepada para Pekerja Sosial agar memperkuat kehidupan dalam sosial kepekaan kesalehan dan bermasyarakat, misalnya melalui revitalisasi program/ kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih terencana, terarah dan terpadu, sambil menginternalisasikan kepekaan

5.

dan kesalehan sosial Civitas Academica. Sifat-sifat <sub>Sidik</sub>, Amanah, Fathonah dan Tablig, selayaknya menjadi citr<sub>a diri</sub> Pekerja Sosial di Indonesia.

Optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Peran Pendidikan 6. Kesejahteraan Sosial dalam perkembangan kehidupan sosial tercermin dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian pendidikan dharma diharapkan Dengan masyarakat. mencerahkan masyarakat. dapat tinggi perguruan Dengan dharma penelitian diharapkan dapat melakukan inovasi teknologi temuan-temuan Pekeriaan Sosial masyarakat diharapkan pengabdian Adapun dharma mampu mengaplikasikan kompetensi Pekerjaan Sosial dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Optimalisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain dengan mengemas substansinya agar relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam rangka mengatasi masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial dapat didekati dari sisi akademis untuk dapat diurai dan dipahami, kemudian masalah sosial dapat dikaji, diteliti agar menghasilkan solusi atau model penanganan yang tepat cara dan diterapkan melalui pengabdian masyarakat (dikutip dari kesempatan sesegera mungkin. http://www.organisasi.org /1970/01/definisi-pengertian masalah-sosial-dan-jenis-macam-masalah-sosial-dalam masyarakat.html pada tanggal 13/12/14 pukul 00:22)

## 3. Tentang Ilmu Kesejahteraan Sosial

Sejarah perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari disiplin pekerjaan sosial, karena Ilmu kesejahteraan Sosial merupakan perkembangan pemikiran dari disiplin pekerjaan sosial. Akan tetapi, bila pada disiplin pekerjaan sosial (social work) pembahasan lebih banyak dipengaruhi oleh disiplin Psikologi dan Sosiologi. Ini dapat dilihat dengan mudah dari hasil bacaan yang ditulis oleh Malcolm Payne (modern social work theory). Dalam buku tersebut, pengaruh dari pendekatan psikologi sangat dominan, kemudian dilengkapi dengan disiplin Sosiologi, yang diikuti dengan perspektif Ekonomi dan Manajemen, Hukum, Kesehatan dan Politik terasa lebih kental.

Perkembangan ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial, pada titik awal, masih sama dengan Pekerjaan Sosial. Perbedaan ini mulai terasa ketika sekolah atau jurusan yang ada bukan saja memfokuskan pada aspek pekerjaan sosial saja, tetapi sudah mengarah pada perkembangan dunia kesejahteraan yang lebih luas atau dari level mikro ke hal yang relatif lebih makro.

Ilmu kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi dan tehnik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Rukminto, definisi ilmu kesejahteran sosial merupakan suatu ilmu terapan yang mengkaji dan

PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA: 133

mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang (termasuk di dalamnya kesempatan bekerja dan berpartisipasi dalam pembangunan).

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan yang mempunyai fokus kajian baik teoritis maupun metodologis terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup (derajat kehidupan) bagi masyarakat.

#### a. Sasaran Ilmu Kesejahteraan Sosial

Sasaran ilmu kesejahteran meliputi beberapa hal di antaranya:

- 1) Kondisi Kesejahteraan (individu, kelompok, dan komunitas)
- 2) Aktivitas Kesejahteraan
- Kebutuhan (pelayanan sosial)
- 4) Fakta kesejahteraan
- 5) Institusi / organisasi pelayan sosial,
- 6) Negara kesejahteraan.

Aspek utama dalam perkembangan ilmu kesejahteraan sosial maupun praktek pekerjaan sosial Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan fungsi memberikan pertolongan, ilmu kesejahteran sosial dituntut untuk mempunyai kerangka pemikiran (theoretical background) yang cukup memadai untuk mendukung perkembangan dan metodologi dan juga Praktek kesejahteraan sosial. Untuk itu maka terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan yaitu:

- Aspek Kerangka Pemikiran (theoretical background) yang memberikan landasan pengetahuan untuk mengembangkan metodologi guna meningkatkan kesejahteraan sosial
- Aspek Metodologi (Methodology), yang terkait dengan dua unsur utama ilmu kesejahteraan sosial, sebagai ilmu terapan

Metode Penelitian (Research method), antar lain berfungsi sebagai metode yang dikembangkan guna melakukan telaah yang bersifat praktis terhadap fenomena yang ada, maupun upaya intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang telah dikembangkan.

Metode Intervensi (Intervention Method), khususnya metode intervensi sosial. Metode intervensi ini perlu dikembangkan terkait dengan keberadaan ilmu Kesejahteraan sosial sebagai Ilmu Terapan, dengan sasarannya adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tanpa adanya metode intervensi yang dikembangkan maka ilmu kesejahteraan sosial akan mandek. Karena itulah pengkajian dan pembaharuan model intervensi baik strategi maupun tehnik harus terus dilakukan sejalan dengan adanya perubahan pada masyarakat.

Aspek Praktek (Practice) juga merupakan aspek yang harus dikembangkan terkait dengan keberadaan ilmu kesejahteraan sosial sebagai ilmu terapan. Tanpa adanya aspek Praktek, seseorang mahasiswa akan sulit untuk mengembangkan ketrampilan praktisnya.

### b. Orientasi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menurut Sumarnonugroho, dalam Suud, ilmu kesejahteraan sosial memiliki tiga orientasi yang dalam prakteknya saling berkaitan. Masing-masing adalah:

- Orientasi akademik, mengemban tugas memprediksikan dan memecahkan masalah secara teoritis, Ilmu kesejah teraan sosial diharapkan menunjukkan kompetensinya membina teori-teori, baik dalam mengembangkan meta teori (pembinaan dan pengembangan teori dan hipotesa teori) maupun teori Praktek (penciptaan model-model pemecahan masalah).
- Orientasi klinis, mengemban tugas mengarahkan tinjauan teoritik dan prediksi ilmu sistem klien,20 mencakup kegiatan diagnose klien dan keterlibatan terhadap pemecahan masalah. Orientasi ini dikedepankan sejak awal perkembangan ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan

Orientasi strategik, mengemban tugas memandang masalah yang ada di luar sistem klien. Sumberdaya atau lingkungan diluar diri klien berpengaruh terhadap pemecahan maslah klien. Studi-studi kelayakan, riset dan kebijakan sosial politik menandai keterkaitannya dengan penerapan ilmu kesejahteraan sosial dan Praktek pekerjaan sosial.

### c. Pusat Perhatian Ilmu Kesejahteran Sosial

Imu kesejahteraan sosial memfokuskan perhatiannya terhadap orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan-pelayanan sosial dari lembagalemabaga kesejahteraan sosial, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar.

Gambaran tentang lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, khususnya yang disediakan oleh negara, perhatian biasanya terfokus pada pelayanan-pelayanan pokok. Ini sering disebut dengan lima besar pelayanan-pelayanan sosial, yang meliputi programprogram pemeliharaan penghasilan seperti jaminan sosial dan asistensi sosial, pelayanan kesehatan, program pendidikan, perumahan, dan pelayanan pekerjaan sosial yang dikenal juga dengan sebutan pelayanan sosial personal.

### d. Metode Ilmu Kesejahteraan Sosial

Ilmu pengetahuan mensyaratkan adanya metode yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan, karena ilmu merupakan pengetahuan yang mempunyai cara-cara tertentu, atau bermetode, maka pengetahuan keilmuan (sience) berbeda dengan pengetahuan pada umunya (knowledge). Menurut Suriasumantri, dalam memperoleh ilmu pengetahuan harus memenuhi dua pola yakni; Rasional dan empiris. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis. Sedangkan empirisme menyajikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

Gabungan dari kedua metode inilah yang dinamakan metode keilmuan. Metode keilmuan yang dipakai dalam ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya satu macam melainkan bermacam-macam. Ini dikarenakan sasaran dari ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya satu melainkan lebih dari satu. Hal ini dapat dilihat bahwa ilmu kesejahteraan sosial berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu bukan merupakan permasalahan jika ilmu kesejahteraan sosial mengadopsi metode-metode keilmuan yang sudah lazim dipakai oleh ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, maupun ilmu politik.

Pada realitasnya ilmu-ilmu sosial tersebut selalu berbagi metode keilmuan dengan ilmu kesejahteran sosial, sebab dengan adanya kerjasama antara sosiolog, psikolog, antropolog, dan ilmuan politik dengan sarjana kesejahteraan sosial/pekerja kompleksitas masalah yang ada di masyarakat. Inilah yang disebut dengan pendekatan multidisipliner atau interdisipliner dalam konteks ilmu kesejahteran sosial dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang terdiri dari empat komponen yang saling berhubungan, yaitu masalah sosial, tujuan kebijakan, perundangan/peraturan, dan program.

Ini merupakan konseptualisasi sistem kesejahteraan sosial yang paling sederhana. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu kesejahteraan sosial juga menjelaskan mengapa diadakan atau diperlukan program-program kesejahteran sosial, seperti teori hak akan kesejahteraan sosial, teori konvergensi, pandangan fungsionalis, pandangan Marxist, dan pandangan keadilan sosial. Dari hasil kerja keilmuan tersebutlah sehingga dapat memperkuat kedudukan kesejahteraan sosial sebagai ilmu, di samping pekerjaan sosial sebagai ilmu terapan (profesi).